

Disorot Minir, Anggaran Belanja Malah Naik

CILACAP - Di tengah sorotan minir masyarakat terhadap buruknya pengelolaan keuangan karena banyaknya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pemkab justru menaikkan sejumlah pos belanja pada APBD Perubahan 2014. Anehnya kalangan DPRD Kabupaten Cilacap malah menyetujui pembahasan lebih lanjut APBD Perubahan 2014 ini seperti dalam rapat paripurna di kantor DPRD, Jumat (11/7).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Toto Yulisantoso juga memberi ca-

tatan terkait dengan karut marutnya pengelolaan anggaran yang menjadi temuan BPK.

Pos belanja yang mengalami kenaikan antara lain pos belanja hibah, yang semula Rp 49.447.595.000, bertambah Rp 37.414.291.000. Sehingga totalnya menjadi Rp 86.861.886.000. Kenaikan di Pos belanja sosial, yang semula Rp 2.635.250.000, bertambah Rp 78.500.000. Sehingga totalnya menjadi Rp 2.713.750.000,.

Selain itu juga ada penambahan pada pos belanja langsung. Dari semula Rp 758.253.765.000,

bertambah 34,92 persen atau Rp 264.765.329.800, sehingga totalnya menjadi Rp 1.023.019.094.800.

"Yang harus diperhatikan dari adanya kenaikan anggaran yang cukup besar ini adalah, keterbatasan waktu untuk APBD Perubahan," jelas Ketua Fraksi Benteng Keadilan, H Arwani Amin LC.

Belum lagi pembahasan akan menghadapi libur panjang Idul Fitri, pelantikan anggota dewan baru. "Kami berharap pembahasan ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga bisa ditetapkan se-

belum pelantikan anggota dewan baru," ujarnya.

Belum lagi, katanya, posisi Pemkab Cilacap yang sedang menjadi sorotan luas terkait pengelolaan anggaran yang belum sesuai prosedur baku, seperti tanpa adanya NPHD.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar, Parsiyan memberi catatan untuk mengefisienkan anggaran agar dinas instansi pemkab meninjau kembali anggaran yang diindikasikan terjadi pemborosan. ■

Ady-ad